



RELEVANSI SKALA OPTIMUM BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN *FINANCIAL* *DISTRESS* KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

Ketut Arya Udayana¹, Alfie Satria Hidayat², Sani Andina Yuniati³,

Briliana Cahya Meilana⁴, Chynika Salsabillah Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta

Alamat Korespondensi: briliana.cahya@kemenkeu.go.id

Abstract

This research attempts to evaluate the impact of optimum government size to economic growth and the government financial distress in districts of Maluku. The government size would intuitively drive economic growth. Especially in the eastern hemisphere of Indonesia which has lower economic activity compared to other regions. Furthermore, the bigger government size would increase the government's financial distress, since the income could not cover the mandatory spending and long term liabilities. The evidence of this research shows that the government size does not significantly impact both the per capita regional GDP and financial distress of the districts in Maluku. However, the level of private sector investment is significant in forming the per capita regional GDP and the level of liabilities would affect the level of government financial distress. The results also demonstrate the importance of government expenditure composition, especially mandatory spending, that may be considered as the significant factors that impact overall economy and the local government financial condition.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh skala optimum belanja pemerintah dibandingkan dengan produk domestik regional bruto (*government size*) terhadap pertumbuhan ekonomi dan *Financial Distress* kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku. *Government size* secara intuitif akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terutama daerah timur Indonesia yang tingkat aktivitas ekonominya cenderung rendah. Di saat yang sama, besarnya belanja pemerintah berisiko menimbulkan kerentanan finansial terutama di daerah karena pendapatannya berpotensi tidak mampu menutupi belanja *mandatory* dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *government size* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan kerentanan fiskal kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku, namun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pengaruh signifikan terhadap



pertumbuhan ekonomi, selain itu tingkat kewajiban pemerintah berdampak signifikan terhadap kerentanan fiskal. Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan pentingnya komposisi belanja pemerintah terutama belanja wajib dalam memberikan dampak kepada ekonomi dan ketahanan keuangan pemerintah daerah.

Keywords: *Debt Service Coverage Ratio, Financial Distress, Government Size*

JEL Classification: C23, H5, H72, O40

PENDAHULUAN

Peran dan Dampak Belanja Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wahyudi (2020) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang diikuti campur tangan pemerintah dalam bentuk belanja. Apabila tidak terdapat campur tangan pemerintah, maka hanya akan ada sedikit kekayaan yang akan diakumulasi oleh aktivitas ekonomi. Untuk itu, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan peningkatan belanja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) dari dua periode yang berbeda. PDRB merupakan keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin meningkatnya PDB menunjukkan produktivitas yang meningkat sehingga akan menyebabkan pendapatan masyarakat yang meningkat, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan (Jundi, 2014).

Meskipun diperlukan, intervensi pemerintah bukanlah syarat yang cukup untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat monopoli sumber daya ekonomi dan unsur ekonomi penting lainnya sehingga masyarakat tidak berhasil memperoleh pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sangat kecil, pertumbuhan ekonomi sangat terbatas karena kesulitan dalam penyediaan barang publik. Oleh karena itu, tingkat optimalisasi pengeluaran pemerintah yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sangat krusial (Asimakopoulous & Karavias, 2016).

Berbagai penelitian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui rasio antara pengeluaran pemerintah dengan PDB, yang dikenal dengan *government size*. Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat diimbangi dengan peningkatan PDB. Dalam hal ini peran pemerintah dalam perekonomian sangat penting (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Hal ini dapat dilihat melalui pengeluaran di bidang ekonomi dan total pengeluaran yang cenderung meningkat. Penelitian lain oleh Barro (1990) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh positif tersebut hanya

sampai pada titik tertentu saja. Apabila melewati titik tersebut, pengaruhnya menjadi negatif.

Hubungan antara *government size* yang diukur dengan tingkat pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan perdebatan luas, tidak hanya secara empiris tetapi juga secara teoritis. *Government size* sering dikaitkan melalui kebijakan fiskal. Menurut aliran pemikiran ini, kebijakan fiskal mendorong kegiatan ekonomi, terutama selama resesi. Ketika mekanisme pengaturan mandiri dalam perekonomian gagal mendorong perekonomian kembali ke keseimbangan, sebagai akibat dari kelakuan di pasar tenaga kerja, Teori Keynesian mengungkapkan hal ini menjadi pendukung kuat kebijakan fiskal ekspansif bagi ekonomi untuk terhindar dari resesi yang panjang dan lumpuhnya perekonomian.

Di sisi lain, belanja pemerintah sendiri dibiayai oleh pendapatannya dan pada kebijakan fiskal ekspansif belanja ditutup dengan pembiayaan yang akhirnya menimbulkan beban kewajiban pada neraca pemerintah. Adapun dalam konteks ekonomi regional, belanja pemerintah juga dibiayai oleh dana transfer dari pemerintah pusat yang merupakan wujud hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, apabila belanja pemerintah cukup besar untuk memenuhi skala optimumnya sedangkan pendapatan dan transfer tidak mencukupi, maka perlu pembiayaan (non SiLPA) yang menimbulkan beban kewajiban dan akhirnya berpotensi menimbulkan kerentanan keuangan pemerintah (*financial distress*).

Financial distress pemerintah merupakan kondisi di mana kemampuan keuangan atau pendapatan pemerintah untuk membiayai belanja wajib/*mandatory spending* untuk melayani masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran kewajiban/utangnya (Jones & Walker, 2007). Kondisi ini diwakili oleh *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) (Sutaryo et al., 2010 dan Winarna et al., 2017). Sedangkan dalam konstruksi peraturan perundang-undangan di Indonesia DSCR dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dimana kondisi DSCR yang diperkenankan untuk melakukan pinjaman daerah adalah di atas 2,5.

Dikaitkan dengan konsep *government size*, meskipun skala belanja pemerintah cukup optimum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terkandung risiko *financial distress* ketika belanja didominasi oleh belanja wajib ataupun kewajibannya cukup besar. Kemandirian fiskal berupa pendapatan yang tinggi, rendahnya ketergantungan transfer dari pemerintah pusat dan komposisi belanja pegawai yang tidak terlalu besar serta belanja infrastruktur yang memadai akan menurunkan tingkat *financial distress* (Sutaryo et al., 2010 & Winarna et al., 2017).

Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Dalam implementasi otonomi daerah, pemekaran daerah banyak dilakukan oleh berbagai provinsi termasuk Provinsi Maluku. Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 1.392 pulau. Sebagian wilayahnya terdiri atas perairan dengan

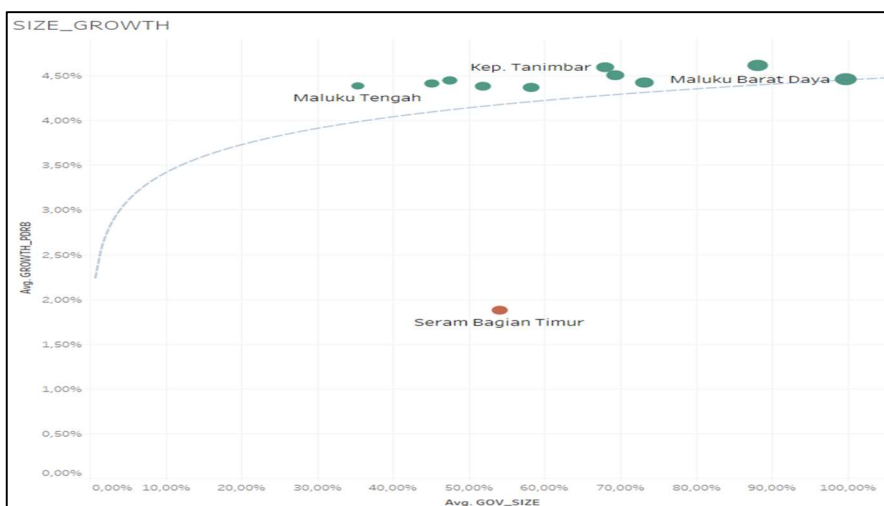
luas daratan tercatat sebesar 46,914 km². Provinsi Maluku dengan keunikan geografisnya berupa perairan luas dan daratan yang subur di beberapa daerah, menjadikan sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan sebagai penggerak utama dalam membangun perekonomian daerah. Secara administratif, Provinsi Maluku terbagi menjadi 2 kota dan 9 kabupaten (LOCALISE SDGs Indonesia, 2022).

Terdapat beberapa karakteristik daerah provinsi yang berciri kepulauan. Pertama, daerah tersebut diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan tata ruang dan pengaturan administrasi. Selain itu, daerah tersebut mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan di bidang kelautan setelah memenuhi norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kedua, dalam perhitungan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan dengan cara menghitung luas wilayah lautan daerah setempat. Selain itu, sebagai dukungan terhadap percepatan pembangunan, pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK. Ketiga, daerah tersebut diberi ruang gerak dengan menyusun strategi percepatan pembangunan sesuai kebutuhan daerah setempat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara rata-rata pertumbuhan ekonomi dan *government size* pada Gambar 1 menunjukkan pengelompokan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,3%-4,6% kecuali di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dari

Gambar 1. Pengelompokan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: diolah penulis

visualisasi sebaran *government size*, diketahui bahwa meskipun memiliki skala yang paling kecil, Kabupaten Maluku Tengah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif tidak jauh dengan Kabupaten Maluku Barat Daya yang skalanya jauh lebih besar. Namun demikian, tidak dapat secara langsung diartikan bahwa Kabupaten Maluku Tengah memiliki skala yang paling optimum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan profil pendapatan dan belanja pada kabupaten/kota pada Provinsi Maluku pada Gambar 2 menunjukkan bahwa secara umum komposisi belanja wajib dibandingkan belanja total berkisar 70% kecuali Kota Ambon yang memiliki belanja APBN lebih besar dibandingkan daerah lain. Sedangkan rasio pendapatan menjelaskan bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedikit lebih besar (sekitar 20%-50%) di atas dana transfer (DAU+DBH) kecuali Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum beban belanja wajib dalam anggaran

pemerintah daerah sangat besar sedangkan besaran dana transfer dari pusat hampir seimbang dengan PAD, yang secara intuitif menyiratkan adanya potensi risiko kerentanan fiskal.

Dari beberapa uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis signifikansi pengaruh hubungan *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi dan kerentanan fiskal salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Maluku. Isu ini dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengkaji kebijakan fiskal yang dapat secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus tetap menjaga risiko fiskal yang tidak akan mengganggu operasional layanan publik serta tetap mendorong peningkatan kesejahteraan kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

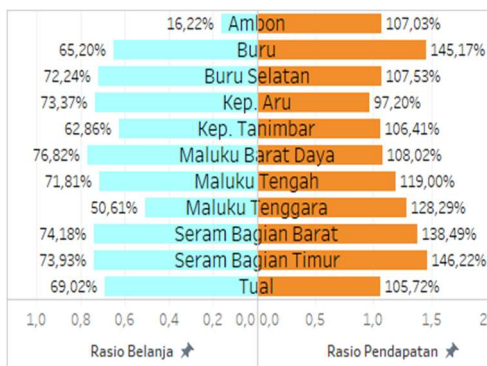
TINJAUAN LITERATUR

Skala Optimum Belanja Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian oleh Barro (1990), *government size* adalah rasio belanja pemerintah dengan PDB. Menurut Vedder & Gallaway (1998), belanja pemerintah yang digunakan untuk menghitung *government size* adalah total belanja pemerintah, sedangkan menurut Ferris & Voia (2015) menggunakan total belanja non bunga, dan menurut Chiou-Wei et al. (2010) menggunakan pengeluaran konsumsi pemerintah. Dalam penelitian Abounoori & Nademi (2010) menggunakan belanja pemerintah yang digunakan untuk menghitung *government size* adalah pengeluaran investasi pemerintah.

Penelitian empiris mengenai hubungan antara *government size* dan

Gambar 2. Rata-rata Rasio Belanja dan Pendapatan Kab/Kota pada Provinsi Maluku 2016-2021



Sumber: diolah penulis

pertumbuhan ekonomi yang dilakukan sejak tahun 1980-an oleh para peneliti menghasilkan tiga pandangan utama. Pertama, perluasan *government size* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan hasil empirisnya adalah terdapat korelasi positif yang signifikan. Mereka menganjurkan "teori pemerintah besar" dan percaya bahwa memperluas *government size* dapat memperkuat kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Robinson (1977) menggunakan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB untuk mengukur *government size* dengan menggunakan sejumlah besar data sampel internasional, ia menyimpulkan bahwa *government size* dapat mengurangi ketergantungan negara-negara kurang berkembang, terutama negara-negara miskin. Memperbesar *government size* akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil empiris Easterly & Rebelo (1993) percaya bahwa pengeluaran investasi pemerintah sebagai proporsi dari PDB berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah diharapkan dapat dinikmati merata oleh seluruh masyarakat, khususnya, belanja pemerintah untuk infrastruktur seperti sarana transportasi, jalan raya, pos dan telekomunikasi yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Singh & Sahni (1984) dan Ram (1986), pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Walaupun ada penelitian yang menunjukkan pengaruh positif, penelitian oleh Landau (1983) dan Miller & Russek (1990) menemukan bahwa

pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah yang tidak efisien dan proses pembuatan peraturan berbiaya tinggi, serta kebijakan moneter dan fiskal yang berdampak pada insentif ekonomi dan mengurangi produktivitas dalam perekonomian.

Penelitian empiris terkait pengaruh *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi terus dilakukan pada setiap negara seperti Duasa (2017) dan Afonso & Jalles (2011) maupun di tingkat regional seperti Santika & Qibthiyyah (2019). Di Indonesia sendiri, pengelolaan keuangan sudah dipercayakan ke pemerintah daerah melalui desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Dalam literatur ekonomi, perbedaan dalam mendefinisikan *government size* jauh lebih besar daripada perbedaan dalam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan tiga indikator untuk mengukur *government size*. Pertama, proporsi pengeluaran pemerintah dalam PDB. Kedua, jumlah instansi administrasi pemerintahan. Ketiga, rasio jumlah pegawai negeri sipil pemerintah terhadap jumlah penduduk atau lapangan kerja. Indikator *government size* yang paling umum digunakan adalah indikator pertama, yaitu proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Ada korelasi positif antara indikator ini dan *government size*. Semakin banyak pengeluaran pemerintah, semakin besar *government size*.

Adapun fakta bahwa hubungan negatif antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan sebagian besar berasal

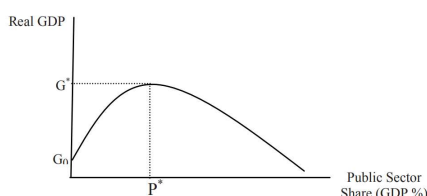
dari data panel dari banyak negara yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda (Ghali, 1998). Fakta ini menyebabkan beberapa penelitian menyatakan bahwa temuan tersebut mungkin tidak berlaku untuk satu negara individu yang menggunakan kumpulan data deret waktu.

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan pengaruh negatif antara *government size* dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh tulisan Afonso et al. (2005) yang melihat bahwa negara-negara di sektor publik lebih efektif. Regulasi yang jelas juga menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan masyarakat yang memiliki tujuan politik dalam pengeluarannya.

Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan karena Indonesia menganut sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 1999. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian dibandingkan sebelum menganut sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh dari belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun belanja pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu APBN yang berkaitan dengan belanja kementerian yang dialokasikan ke setiap provinsi, belanja pemerintah dari APBD Provinsi, dan belanja pemerintah dari APBD kabupaten/kota.

Teori ekonomi memiliki beberapa mekanisme yang menjelaskan aktivitas pemerintah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, mekanisme ini tidak menunjukkan

Gambar 3. Inverted U Shape Armey Curve



Sumber: Armey (1995)

hubungan yang jelas antara *government size* dan pertumbuhan ekonomi, hal ini selaras dengan Kurva Armey. Ada berbagai faktor yang menghasilkan hubungan berbentuk kurva U terbalik antara *government size* dan pertumbuhan ekonomi, sebuah hipotesis yang disebut sebagai Kurva Armey.

Kurva Armey, yang menjelaskan aturan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara keduanya sebelum titik tertentu Coayla (2021). Ada dua sudut pandang untuk menginterpretasikan dampak sektor pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Poin pertama menyatakan bahwa sektor pemerintah yang terlalu berkembang cenderung menekan investasi sektor swasta, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Umumnya, hubungan negatif antara *government size* dan pertumbuhan ekonomi mungkin karena banyak alasan, salah satunya pembiayaan yang mahal.

Armey (1995) mengusulkan kurva berbentuk U terbalik non-linier seperti pada Gambar 3. Hal ini diawali oleh intervensi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun hak milik, menciptakan insentif untuk tabungan atau investasi, memastikan hukum dan

ketertiban serta memfasilitasi kemudahan berbisnis. Namun, kenyataannya intervensi pemerintah yang berlebihan dalam ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Studi lain, Tanzi & Zee (1997), menegaskan keberadaan Kurva Armey menyatakan bahwa instrumen keuangan publik, pajak, dan pengeluaran serta secara keseluruhan kebijakan anggaran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Instrumen keuangan ini sangat membantu dalam memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil di seluruh masyarakat, melestarikan stabilitas ekonomi dan mempromosikan efisiensi ekonomi.

Penelitian Sriyana (2016) menggunakan hubungan kurva U terbalik ini melalui model kuadratik dengan melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan *government size*. Penelitian ini membandingkan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan data tahun 1970-2014 dan ditemukan bahwa belanja pemerintah yang optimal di Indonesia sebesar 12,55%.

Pemerintah dalam hal ini dianggap sebagai aktor yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki fungsi untuk menjaga transparansi melalui pengembangan hukum dan hak milik yang kondusif untuk pertumbuhan. Keterlibatan pemerintah memiliki peran yang tidak terbantahkan yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Studi oleh Colombier (2009) mengemukakan bahwa *government size*

tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Colombier (2009) telah menemukan efek positif yang kecil dengan mempertahankan penelitian lain yang menggunakan estimator kuadrat terkecil yaitu 'bias dan tidak efisien'.

Ada banyak pendapat tentang ukuran dan definisi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Kuznets (1971) pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan jangka panjang dalam kemampuan untuk menyediakan penduduk dengan berbagai produk ekonomi yang semakin beragam. Kinerja pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan peningkatan produk ekonomi, yaitu peningkatan PDB. Kuznetz (1971), menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan PDB atau peningkatan PDB per kapita.

Financial Distress

Kerangka konseptual *financial distress* pemerintah sebenarnya dibangun dari adopsi/modifikasi yang berlaku di dunia korporasi atau sektor privat, di mana rasio kemampuan membayar kembali pinjaman/hutang yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR) digunakan oleh kreditur ketika akan memberikan pinjaman/pembiayaan kepada entitas debitur (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah). DSCR merupakan alat untuk memprediksi apakah suatu entitas dapat memenuhi kewajibannya ketika menerima pembiayaan. Pada sektor privat, DSCR diperoleh dari informasi laporan keuangan (laporan laba rugi,

arus kas dan neraca) yang mencerminkan ukuran kinerja perusahaan seperti rasio pendapatan, rasio likuiditas, rasio aset, dan rasio kewajiban.

Pada sektor publik di Indonesia, rasio DSCR didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{((PAD + DAU + (DBH - DBHDR)) - BW)}{\text{Pokok pinjaman} + \text{bunga} + BL} \geq x$$

DSCR	: Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Daerah yang bersangkutan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBHDR	: Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
BW	: Belanja Wajib
Pokok Pinjaman	: Angsuran Pokok Pinjaman
Bunga	: Beban bunga pinjaman
BL	: Biaya lain
x	: DSCR yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Di mana besaran *threshold* DSCR yang ditetapkan sebesar 2,5.

Berbagai penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan fiskal pemerintah daerah di Indonesia menggunakan beberapa variabel belanja dan pendapatan pemerintah daerah. Halim et al. (2016) menggunakan rasio belanja modal, rasio kemandirian fiskal (besaran PAD), rasio ketergantungan dengan transfer pemerintah pusat (besaran dana transfer). Mereka menemukan tidak ada dampak signifikan antara kemandirian atau ketergantungan pendapatan dengan kerentanan fiskal yang diwakili dengan rasio belanja modal

dibandingkan total belanja pada provinsi NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Dalam penelitian lain, Shiddiqy et al. (2022) dengan objek penelitian pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur menggunakan modifikasi DSCR dengan menggunakan rasio belanja operasional dibandingkan pendapatan dan dana transfer dengan tidak memperhitungkan adanya kewajiban. Dengan membandingkan rasio-rasio kinerja keuangan (pendapatan, belanja, aset, likuiditas, dan solvabilitas), penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian pendapatan, komposisi belanja pegawai dan belanja modal berdampak signifikan pada kondisi *financial distress*. Sedangkan ukuran kinerja dari sisi sumber dan struktur kewajiban utang tidak signifikan mempengaruhi *financial distress*.

Wulandari et al. (2018) yang meneliti kondisi keuangan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan opini laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan *disclaimer* tahun 2012-2016 menemukan bahwa ukuran aset, pendapatan, belanja, dan kewajiban yang diukur dengan rasio aset, rasio biaya tetap, dan rasio utang ternyata signifikan berdampak pada kondisi kerentanan DSCR. Hasil penelitian dengan variabel yang sama-sama bersumber dari kinerja laporan keuangan juga menunjukkan bahwa signifikansi dampak dari ukuran pendapatan dan komposisi belanja serta aset-kewajiban dalam memengaruhi kondisi kerentanan fiskal (Winarna et al. (2017). Penelitian ini juga menguji variabel ukuran luas wilayah yang ternyata juga berpengaruh signifikan pada DSCR.

Beberapa hal yang dapat digeneralisasi dari hasil penelitian-penelitian di atas adalah komposisi belanja *mandatory* (dengan definisi operasional yang beragam: belanja pegawai, belanja operasional, *fixed cost*) dengan belanja modal/infrastruktur berdampak signifikan terhadap kondisi DSCR lebih besar dari 2,5 atau tidak. Kemudian rasio dan komposisi pendapatan/dana transfer terhadap kinerja aset-kewajiban juga memengaruhi kerentanan fiskal. Dengan demikian, skala belanja pemerintah daerah (*government size*) yang akan diukur dampaknya terhadap *financial distress* menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model analisis data panel dengan menggabungkan variabel independen antar data silang (*cross section*) dan runtut waktu (*time-series*).

Dari data yang didapatkan, penelitian ini menggunakan sebelas kabupaten/kota di Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual dan Kota Ambon pada periode 2016-2021.

Untuk pengujian hubungan antara *government size* dan ekonomi, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yakni PDRB Perkapita harga berlaku dan variabel independen antara lain belanja pemerintah/PDRB

harga berlaku, belanja pemerintah/PDRB harga berlaku kuadrat, dan PMTB/PDRB harga berlaku.

Data PDRB Perkapita harga berlaku dan PMTB harga berlaku didapat dari terbitan Maluku Dalam Angka oleh BPS Provinsi Maluku. Data G (data belanja pemerintah) merupakan data realisasi belanja kementerian/lembaga yang dialokasikan melalui satuan kerja di setiap kabupaten/kota dan realisasi belanja APBD didapat dari LKPD. .

Dari data tersebut, model persamaan empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Lny_{it} = \beta_0 + \beta_1 \left(\frac{G}{PDRB} \right)_{it} + \beta_2 \left(\frac{G}{PDRB} \right)_{it}^2 + \beta_3 \left(\frac{PMTB}{PDRB} \right)_{it} + \beta_4 RLS_{it}$$

dengan :

- Lny_{it} : log linier PDRB per kapita atas harga berlaku;
 $G/PDRB$: *government size* yaitu persentase belanja pemerintah di daerah (realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Maluku) dengan PDRB harga berlaku;
 $PMTB/PDRB$: rasio PMTB dengan PDRB harga berlaku, rasio ini menginterpretasikan *saving rate*;
 i : 1,2,... k Kabupaten/Kota yang ada dalam penelitian ($K=11$);
 t : periode tahunan, yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

Sedangkan untuk pengujian dampaknya terhadap DSCR, menggunakan modifikasi dari model Wulandari et al. (2018) di mana variabel dependen yang digunakan adalah

belanja tetap dibandingkan pendapatannya, sedangkan dalam penelitian ini digunakan DSCR, adapun variabel independen yang digunakan adalah *government size*, *return on asset*, rasio kekayaan pemerintah (aset dibandingkan pendapatan) dan rasio kewajiban (kewajiban dibandingkan pendapatan). Model persamaannya sebagai berikut:

$$DSCR_{it} = \beta_0 + \beta_1 GS_{it} + \beta_2 ROA_{it} + \beta_3 POSGW_{it} + \beta_4 DTR_{it} + \varepsilon_{it}$$

dengan:

- DSCR : *Debt Service Coverage Ratio*, di atas 2,5;
- GS : *government size* yaitu persentase belanja pemerintah di daerah (realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Maluku) dengan PDRB harga konstan 2010;
- ROA : *Return on Asset*;
- POSGW : *Position of Government Wealth* (rasio aset dan pendapatan)
- DTR : *Debt to Asset Ratio* (rasio aset dan kewajiban)
- i : 1,2,... k Kabupaten/Kota yang ada dalam penelitian (K=11);
- t : periode tahun 2018, 2019, dan 2020 karena keterbatasan informasi neraca dalam laporan keuangan pemerintah daerah

Setelah dilakukan uji terhadap model dengan Uji Hausman dan Uji Chow, maka penelitian ini lebih tepat menggunakan metode *fixed effect*.

Berdasarkan uraian teori dan model di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi akan bernilai positif jika *government size* relatif kecil, namun akan negatif jika *government size* terlalu besar sehingga

pengaruh *government size* akan menjadi negatif.

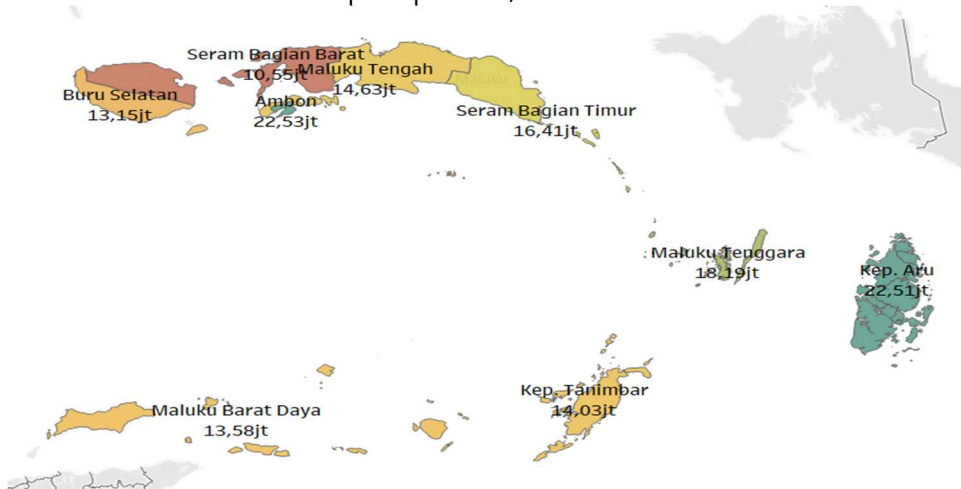
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari BPS pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa PDRB per kapita 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku rata-rata adalah Rp24.196.424,00. Kabupaten/kota dengan PDRB per kapita periode 2016-2021 terendah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Ambon. Salah satu penyebab tingginya Nilai PDRB per kapita Kota Ambon adalah karena Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku yang merupakan pusat kegiatan ekonomi.

Peta pada Gambar 4 menunjukkan adanya perbedaan dari sisi lokasi wilayah dimana terdapat *frontier* terluar yang berbatasan dengan Papua dan Australia dengan pusat wilayah di Ambon dan Maluku Tengah yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini menjadi dasar penggunaan model estimasi *fixed effect* agar mampu menangkap *heterogeneity data cross section*, dalam hal ini kabupaten/kota (Santika & Qibtiyyah, 2020).

Rasio PMTB/PDRB rata-rata di Provinsi Maluku adalah sebesar 38,37%. Kabupaten/kota dengan rasio PMTB/PDRB tertinggi adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 57,52%. Sedangkan tingkat rasio PMTB/PDRB terendah adalah Kota Ambon dengan nilai rasio 19,72%. Komponen Pengeluaran dalam PDRB Kota Ambon didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Gambar 4. Rata-rata PDRB perkapita Kab/Kota Provinsi Maluku 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2020), diolah

Tabel 1. Statistik Deskriptif Model Hubungan *Government size* dan PDRB Perkapita

Variable	OBS	Mean	Std Dev	Min	Max
PDRB Berlaku	66	Rp24.196.424,2	Rp6.485.700	Rp14.261.000	Rp44.710.000
G/PDRB	66	0,411	0,14524	0,1260	0,8960
PMTB/PDRB	66	0,3837	0,1007	0,1972	0,5752

Sumber: BPS, SIKD, OMSPAN Kementerian Keuangan (2016-2021), diolah

Tabel 2. Statistik Deskriptif Model Hubungan *Return on Asset*, rasio kekayaan pemerintah, dan rasio kewajiban

Variable	OBS	Mean	Std Dev	Min	Max
Government Size	33	0,37	0,13	0,12	0,74
ROA	33	-0,0093	0,02	-0,08	0,03
DTR	33	0,04	0,06	0,05	0,23
POSGW	33	1,55	0,34	0,34	2,77

Sumber : BPS, SIKD, OMSPAN Kementerian Keuangan (2018-2020), diolah

Pada Tabel 2, *Debt to Asset Ratio* rata-rata di Provinsi Maluku adalah sebesar 4,7%. Kabupaten/kota dengan *Debt to Asset Ratio* tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 5,7%. Sedangkan tingkat *Debt to Asset Ratio* terendah adalah Kabupaten Buru Selatan dengan nilai rasio 0,009%.

Dari hasil estimasi dengan model *fixed effect* seperti pada Tabel 3, terlihat bahwa *government size* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi atau PDRB, sedangkan PMTB memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada Kabupaten/Kota di Maluku.

Apabila didalami lebih lanjut nilai optimum dari *government size* nya melalui *first difference* dari variabel GS dan GS2, sebagaimana persamaan (1)

$$\frac{\partial \ln PDRB_{perKapita}}{\partial GovernmentSize} : \beta_1 + 2\beta_2 GovernmentSize = 0 \quad (1)$$

$$GovernmentSize^* = \frac{-\beta_1}{2\beta_2}$$

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Variable Independen	
C	16,43187*** (0,224872)
G/PDRB	-0,294634 (0,422617)
G2/PDRB2	0,177246 (0,434735)
PMTB/PDRB	1,623669 (0,504086)

Sumber: Output EVIEWS 12 (diolah)

Keterangan : *Signifikansi pada taraf 10%

**Signifiansi pada taraf 5%

***Signifikansi pada taraf 1%

standard error ditunjukkan di dalam kurung

Adj R² = 0,912908

F=Stat= 41,92835

DW-stat = 1,480464

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

Variable Independen	
C	4,561804 (2,232376)
GS	-0,291339 (3,089895)
ROA	5,909970 (9,273645)
DTR	-33,58317** (13,03283)
POSGW	0,979327 (1,311432)

Sumber: Output EVIEWS 12 (diolah)

Keterangan : *Signifikansi pada taraf 10%

**Signifiansi pada taraf 5%

***Signifikansi pada taraf 1%

standard error ditunjukkan di dalam kurung

Adj R² = 0,781517

F=Stat= 4,599033

DW-stat = 3,310636

maka diperoleh skor 83% namun karena variabel *government size* tidak signifikan, maka dengan *size optimum* pun tetap tidak akan mendorong pertumbuhan pendapatan perkapita di daerah.

Hal yang secara indikatif menyebabkan tidak signifikkannya dampak dari *government size* antara lain adalah tingginya rasio belanja pegawai dibandingkan total belanja pemerintah

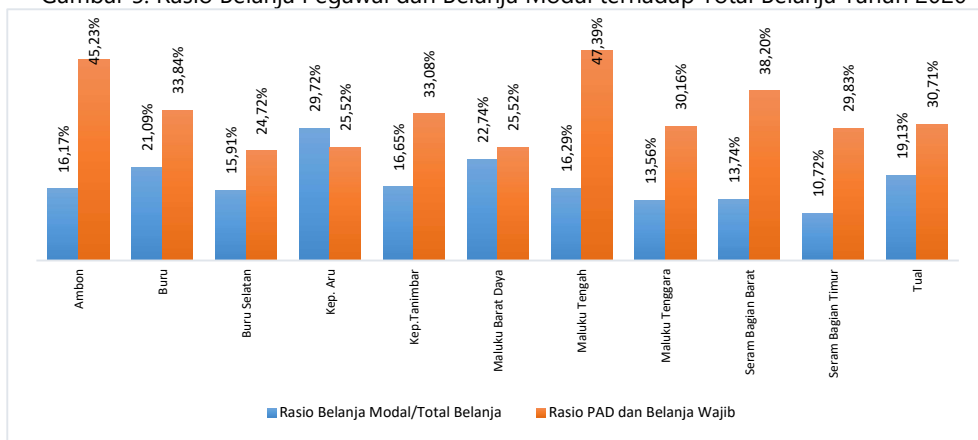
dibandingkan rasio belanja modalnya (Gambar 5). PDRB dari kontribusi pengeluaran pemerintah semestinya didominasi konsumsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memberikan *multiplier effect* kepada pembangunan infrastruktur sehingga mendorong aktivitas konsumsi. Belanja pegawai pemerintah tidak banyak memberikan nilai tambah dalam perekonomian melalui pembentukan modal tetap bruto.

Perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini data belanja pemerintah adalah yang total belanja APBN dan APBD dari laporan keuangan pemerintah yang nilainya jauh lebih besar daripada kontribusi pengeluaran pemerintah pada PDRB yang dirilis BPS. Pengeluaran pemerintah yang dicatat BPS merupakan olahan pergeseran nilai tambah antar komponen dalam PDRB (konsumsi rumah tangga, PMTB, tabungan dan net ekspor). Karena dalam pengeluaran pemerintah dari rilis BPS tidak diketahui proporsi belanjanya.

Sedangkan hasil estimasi terhadap model *financial distress* seperti pada Tabel 4, diketahui bahwa *government size* juga tidak signifikan berdampak meningkatkan nilai DSCR. Demikian pula halnya dengan *variabel rasio aset* (ROA) dan rasio kekayaan pemerintah (POSGW), sedangkan rasio kewajiban pemerintah (DTR) berpengaruh signifikan dan arahnya negatif menurunkan nilai DSCR sesuai dengan postulatnya bahwa meningkatnya kewajiban pemerintah daerah akan meningkatkan kerentanan fiskal.

Beberapa hal yang mengindikasikan penyebab tidak signifikkannya *government size* terhadap kerentanan fiskal antara lain rata-rata

Gambar 5. Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2020

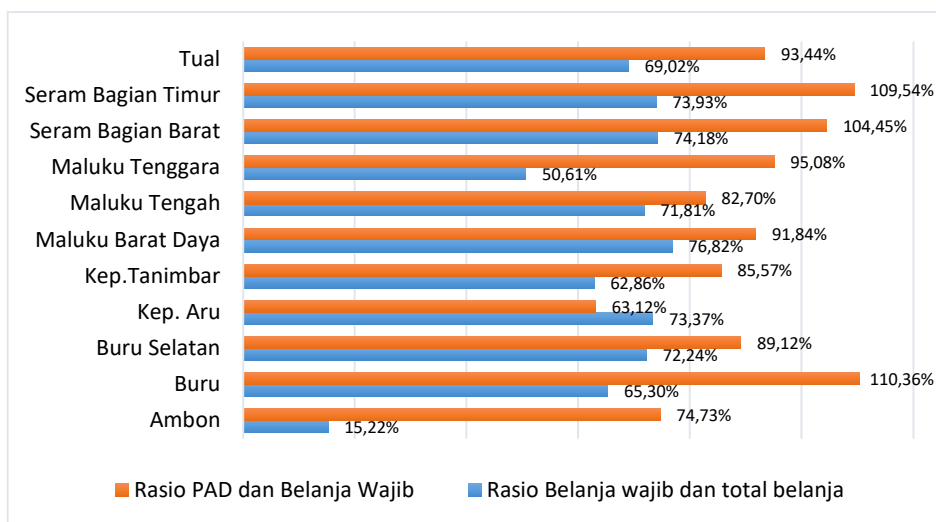


Sumber: diolah penulis

rasio PAD dibandingkan belanja wajib yang cukup besar (terendah 74% dan tertinggi 110%) sebagaimana terlihat di Gambar 6. Dengan demikian tingkat kemandiiriannya cukup baik untuk membiayai pelayanan umum dan layanan pendidikan serta kesehatan dasar sehingga belanja urusan lain bisa dibiayai dari dana transfer ke daerah.

Informasi lain yang menarik adalah bahwa tingginya komposisi belanja wajib dibandingkan dengan total belanja yang cukup besar (rata-rata di atas 50%) kecuali kota Ambon karena dana APBN yang jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak tertangkap

Gambar 6. Rasio Belanja Wajib terhadap Total Belanja dan Rasio PAD terhadap Belanja Wajib Tahun 2016-2021



Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

dalam model karena tingginya kontribusi PAD dan dana transfer yang diterima daerah telah membuat level kerentanan fiskal tidak terpengaruh oleh komposisi belanja sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian tiap kabupaten/kota menyebabkan tidak adanya pengaruh komposisi belanja ke kerentanan fiskal.

Variabel kontrol yang berkaitan dengan aset pemerintah seperti *return on asset* dan *government wealth* tidak berpengaruh signifikan karena pembentukan aset pemerintah secara riil tidak terkait dengan surplus anggarannya, sebagaimana yang terjadi pada dunia korporasi. Di samping itu, aset pemerintah yang berwujud gedung dan bangunan justru lebih merupakan beban dari sisi pemeliharaan dan penyusutan tetapi tidak menghasilkan pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian oleh Santika & Qibtiyyah (2020) mengenai *government size* pada pemerintah daerah di Indonesia pada umumnya menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan antara ukuran belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pengaruh ukuran belanja pemerintah ditransmisikan dalam wujud adanya nilai tambah dari transaksi belanja pemerintah dalam ekonomi. Namun demikian dalam penelitian tersebut belum mendeteksi pengaruh komposisi belanjanya, terutama belanja mengikat seperti belanja pegawai yang kontribusinya dalam memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengadaan barang dan jasa relatif kecil dibandingkan belanja barang dan belanja modal.

Dalam penelitian oleh Santika & Qibtiyyah (2020) Provinsi Maluku merupakan wilayah yang paling tidak optimum ukuran skala belanja pemerintahnya sehingga akan menurunkan PDRB per kapitanya. Dalam penelitian ini, meskipun dampaknya tidak signifikan namun *government size* juga cenderung berdampak negatif terhadap PDRB per kapita. Sedangkan PMTB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah tidak memperbesar belanjanya terutama untuk belanja mengikat. Pemerintah daerah justru harus mencurahkan perhatian untuk mendorong investasi swasta yang lebih banyak sehingga PDRB dapat terus meningkat. Potensi migas di Blok Masela di daerah *frontier* yang berbatasan dengan Papua serta program lumbung ikan nasional yang merupakan keunggulan geografis Maluku perlu diakselerasi. Termasuk juga potensi perkebunan dan pertanian di Pulau Seram, Pulau Buru, dan Kepulauan Aru yang daratannya lebih luas dibandingkan wilayah

Terkait kerentanan fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku, tingginya ukuran PAD dan dana transfer dan kewajiban yang relatif kecil membuat kondisi keuangan pemerintah daerah cukup aman, sehingga ukuran belanja pemerintah tidak signifikan kepada *financial distress*. Namun perlu diperhatikan komposisi belanja wajib yang cukup besar dalam total belanja agar tidak meningkatkan risiko fiskal ketika dana transfer mengalami penurunan.

Hal yang dapat direkomendasikan adalah dengan posisi DSCR yang cukup

baik, maka alternatif pinjaman daerah perlu dilakukan dengan memprioritaskan hasil pinjaman kepada proyek-proyek infrastruktur pemerintah daerah yang memberikan nilai dalam ekonomi. Tentu saja besaran dari pinjaman daerah tersebut perlu memperhatikan ukuran DSCR yang dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah.

Dengan meningkatnya belanja infrastruktur pemerintah daerah yang dibiayai oleh pinjaman daerah yang aman/tidak memicu *financial distress*, maka dapat mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor privat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PMTB yang berpengaruh dalam pertumbuhan PDRB perkapita sebagaimana dijelaskan pada model sebelumnya.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan yang dialami dalam penyusunan penelitian ini antara lain: Pertama, data belanja dan pendapatan yang diambil dari APBN dan APBD kabupaten/kota di lingkup Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2021 merupakan data *unaudited*. Perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini data belanja pemerintah adalah yang total belanja APBN dan APBD dari laporan keuangan pemerintah yang nilainya jauh lebih besar daripada kontribusi pengeluaran pemerintah pada PDRB yang dirilis BPS. Pengeluaran pemerintah yang dicatat BPS merupakan olahan pergeseran nilai tambah antar komponen dalam PDRB (konsumsi rumah tangga, PMTB, tabungan dan net ekspor). Karena dalam

pengeluaran pemerintah dari rilis BPS tidak diketahui proporsi belanjanya

Kedua, data neraca pada laporan keuangan pemerintah daerah periode sebelum 2018 tidak relevan dan untuk tahun 2021 belum dipublikasikan karena masih proses audit BPK.

Ketiga, perbedaan data belanja antara laporan keuangan pemerintah dengan kontribusi pengeluaran pemerintah dalam PDRB yang dirilis oleh BPS yang telah melalui proses pengolahan data dalam menghitung pergeseran nilai tambah dalam komposisi PDRB dari sisi pengeluaran.

Keempat, Coben (2006) menggunakan indikator kinerja keuangan berupa ROA yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan jumlah total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Angka rasio tersebut merupakan proporsi antara jumlah surplus atau defisit anggaran dengan jumlah aset dalam neraca pemerintah daerah. Model *financial distress* yang mengadopsi dari dunia korporasi dengan menggunakan asumsi surplus anggaran sebagai tingkat "keuntungan" masih belum tentu tepat dari sisi konsep, terutama terkait penggunaan faktor penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kemudian karena informasi aktual dalam pos-pos neraca secara riil secara filosofis berbeda penggunaannya dibandingkan sektor privat.

Untuk itu, penelitian ini dapat dijadikan pijakan selanjutnya dalam meneliti pengaruh belanja pemerintah dari sisi ekonomi dan manajemen keuangan, dengan mengembangkan berbagai variabel yang detil dengan mendekomposisi belanja pemerintah

dan menggunakan konsep yang lebih tepat dalam mengukur kerentanan fiskal yang lebih mencerminkan ketahanan keuangan suatu entitas pemerintah.

REFERENSI

- Abounoori, E. & Nademi, Y. (2010). Government size threshold and economic growth in Iran. *International Journal of Business and Development Studies*, 2(1), 95-108.
- Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2005). Public sector efficiency: An international comparison. *Public Choice*, 123, 321-347.
- Afonso, A. & Jalles, J. T. (2011). *Economic performance and government size* (ECB Working Paper Series 1399). Germany: European Central Bank.
- Armey, R. K., & Armey, D. (1995). The freedom revolution: the new republican house majority leader tells why big government failed, why freedom works, and how we will rebuild America.
- Asimakopoulous, S., & Karavias, Y. (2016). The impact of government size on economic growth: A threshold analysis. *Economics Letters*, 139, 65-68.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. *Journal of political economy*, 98(5S), 103-125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Chiou-Wei, S., Zhu, Z., & Kuo, Y. (2010). Government size and economic growth: an application of the smooth transition regression model. *Applied Economics Letters*, 17(14), 1405-1415. <https://doi.org/10.1080/13504850902984295>
- Coayla, E. (2021). The optimal size of government and the army curve: a review of empirical evidence. *Applied Economics Journal*, 28(1), 121-137.
- Colombier, C. (2009). Growth effects of fiscal policies: an application of robust modified M-estimator. *Applied Economics, Taylor & Francis Journals*, 41(7), 899-912.
- Duasa, J. (2018). Measuring the optimal government size that contribute to economic growth of the muslim countries. *SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 1-15.
- Easterly, W. (1999). Life during growth. *Journal of economic growth*, 4(3), 239-276.
- Ferris, J. S. & Voia, M. (2015) The effect of federal government size on private economic performance in Canada: 1870–2011. *Economic Modelling*, 49(C), 172-185
- Ghali, K. H. (1998). Public investment and private capital formation in a vector error-correction model of growth. *Applied economics*, 30(6), 837-844.
- Halim, A., Moi, M. O. V., & Baswir, R. (2016). Fiscal Distress of local government study on regencies/cities in the Provinces of East Nusa Tenggara, Maluku, and North Maluku. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 8(2), 152-160.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of local government distress. *ABACUS*, 43(3), 396-418. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x>
- Jundi. M. (2014). *Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia [Skripsi]*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Landau, D. (1983). Government expenditure and economic growth: a cross-country study. *Southern Economic Journal*, 49(3), 783-792
- LOCALISE SDGs Indonesia. (2022). Profil daerah Provinsi Maluku. Diakses pada tanggal 6 Maret 2022, dari <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/22>
- Kuznets S. (1971). *Economics Growth of Nations*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan ekonomi indonesia: determinan dan prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.
- Miller, S. M. & Russek, F. S. (1990). Co-Integration and error-correction models: the temporal causality between government taxes and spending. *Southern Economic Journal*, 57(1), 221-229
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Jakarta.
- Ram, R. (1986). Government size and economic growth: A new framework and some evidence from cross-section and time-series data. *The American economic review*, 76(1), 191-203.
- Rubinson, R. (1977). Dependence, government revenue, and economic growth, 1955-1970. *Studies in Comparative International Development*, 12(2), 3-28.
- Singh & Sahni (1984). Causality between public expenditure and national income. *The Review of Economics and Statistics*, 66(4), 630-644. <https://doi.org/10.2307/1935987>
- Santika, A. R., & Qibthiyyah, R. M. (2020). Government size dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 212-230.
- Shiddiqy, R. A., & Prihatiningtias, Y. W. (2022). The prediction of financial distress probability in East Java province governments. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(1), 152-160.
- Sriyana, J. (2016). Optimum size of government spending in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences (JAES)*, 11(41), 441-443.
- Sutaryo, Sutopo, B., & Rahmawati. (2012). Relevansi informasi laporan keuangan cash modified basis: kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi status financial distress pemerintah daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Tanzi, V., & Zee, H. H. (1997). Fiscal policy and long-run growth. *Staff Papers*, 44(2), 179-209.
- Winarna, J., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2017). Financial distress of local government: A study on local government characteristics, infrastructure, and financial condition. *Global Business & Finance Review (GBFR)*, 22(2), 34-47.
- Wulandari, I., Nugraeni., & Wafa, Z. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress pemerintah daerah. *Jurnal Riset*

Akuntansi Mercuri Buana, 4(2). 100-105.

Wahyudi. (2020). Pengeluaran pemerintah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*, 103-113.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Vedder, R. & Gallaway, L. (1998). Government size and economic growth. Washington D.C: Joint Economic Committee.